



RENCANA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2026

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN
RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU				
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tabel T-C.29	√			
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel T-C.30	√			
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah				
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH				
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	√			
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	√			
	3.3	Program dan Kegiatan Tabel T-C.33.	√			
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
5	BAB V	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Juli 2025

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung,

FEBRIANA, S.STP., M.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 19860216 200602 2 001

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si NIP. 19690801 199303 2 009	
	Kabid Pemerintah dan Pembangunan Manusia	
2	KOMSIYAH, S.Sos.,MM NIP.19711205 199203 2 004	
	Perencana Ahli Muda	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19700218 199303 2 002

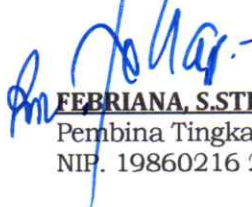
FORMULIR E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung,


FEBRIANA, S.STP., M.I.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19860216 200602 2 001

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si NIP. 19690801 199303 2 009	
	Kabid Pemerintah dan Pembangunan Manusia	
2	KOMSIYAH, S.Sos.,MM NIP.19711205 199203 2 004	
	Perencana Ahli Muda	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

KATA PENGANTAR

i

Kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung akhirnya dapat kami selesaikan tepat waktu. Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD).

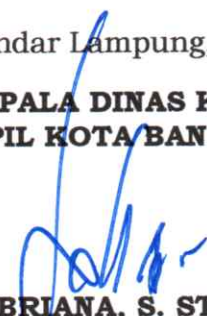
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2026 ini, atas dasar usulan program dan kegiatan dari bidang-bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Kami berharap, apa yang dituangkan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2026. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amin.

Bandar Lampung,

2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG**



FEBRIANA, S. STP., M. IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19860216 200602 2 001

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR VERIFIKASI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang		1
1.2	Landasan Hukum		3
1.3	Maksud dan Tujuan		8
1.4	Sistematika Penulisan		8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah		10
	Tabel T-C.29		
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		19
	Tabel T-C.30		
2.3	Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD		23

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional		32
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah		33
3.3	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan		38
	Tabel T-C.33		

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi Rancangan Akhir Rencana Kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan daerah yang meliputi RPJPD 20 tahun, RPJMD 5 tahun, dan RKPD tahunan. Kemudian dinas/badan daerah wajib menjabarkannya ke dalam rencana strategis (renstra) dinas/badan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi Rencana Kerja

mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Dokumen Rencana Kerja secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain :

1. Merupakan instrument pelaksanaan RPJMD
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD.
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD.
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD.
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas.

Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antar

pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2026 disusun berdasarkan pembahasan dalam beberapa tahapan proses selanjutnya yang meliputi Rakortekrenbang, forum Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan tahap penyempurnaan/sinkronisasi dengan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2026 yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

8. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPMPD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
12. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dimaksudkan untuk merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026, sesuai dengan rencana program prioritas yang telah digariskan dalam Rancangan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2026.

Tujuannya adalah untuk menyelaraskan program/kegiatan yang akan dilaksanakan guna pencapaian tujuan/sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, dan RPJPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- Tabel TC.29

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel TC.30

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel TC.33

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Didalam setiap kegiatan membutuhkan suatu evaluasi dimana evaluasi itu dapat menilai semua kekurangan dan kelebihan dalam suatu organisasi menjalankan kegiatan tersebut, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung juga perlu membuat sebuah evaluasi Renja untuk dapat menilai seberapa jauh kegiatan yang sudah berjalan serta dapat membuat perencanaan kerja terbaik untuk tahun yang akan datang, Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban dalam bentuk angka yang dilaksanakan secara periodik.

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi Perangkat Daerah.

Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.3.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.3.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.3.7 Fasilitas Kunjungan Tamu

1.3.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.3.9 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD

1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1 Pengadaan Meubel

1.4.2 Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya

1.4.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.5.2 Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan

1.6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6.4 Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

2.1 Penataan Pendaftaran Penduduk

2.1.1 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan

2.2 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

2.2.1 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

3.1 Pelayanan Pencatatan Sipil

3.1.1 Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

4.1 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Kependudukan

4.1.1 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

4.1.2 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

4.1.3 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

***Tabel Pencapaian Anggaran dan Realisasi
Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2024)***

No	Program	Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.374.693.499	7.982.907.030	85,20
2	Program Pendaftaran Penduduk	272.208.458	258.736.325	95,05
3	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	228.555.325	188.245.000	82,36
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	665.027.837	612.338.350	86,05

Tabel TC. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan)
Kota Bandar Lampung

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2 026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025					Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						Target Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2025)	Ting kat Real isasi %	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Ting kat Cap aian Real isasi Targ et Rens tra (%)							
1					2	3		4		5		6		7		8=(7 /6) x 100 %	9		10=(5+7+9)		11=(10/4) x 100 %
						Tolak Ukur	Jenis	Nilai	Satuan	Nil ai	Satu an	Nil ai	Satuan	Nil ai	Satuan	Nil ai	Satuan	Nilai	Satuan		
2	12				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
2	12	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasioanl OPD															
2	12	01	2.0 1		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu															

Rancangan Akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026.

2	12	01	2.0 1	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Konsolidasi	Absolute	5	Laporan	2	kali	5	Laporan	5	Laporan	100	5	Laporan	12	Laporan	240
2	12	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel															
2	12	01	2.0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Absolute	53	orang	14	kali	53	orang	53	orang	100	53	orang	120	orang	226, 4
2	12	01	2.0 2	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Absolute	5	Dokumen	12	bulan	5	Dokumen	5	Dokumen	100	5	Dokumen	22	Dokumen	440
2	12	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD															
2	12	01	2.0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor yang Disediakan	Absolute	1	paket	12	bulan	1	paket	1	paket	100	1	paket	14	paket	1400
2	12	01	2.0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Absolute	1	paket	12	bulan	1	paket	1	paket	100	1	paket	14	paket	1400
2	12	01	2.0 6	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Absolute	1	paket	12	bulan	1	paket	1	paket	100	1	paket	14	paket	1400

2	12	01	2.0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Absolute	1	paket	12	bulan	1	paket	1	paket	100	1	paket	14	paket	1400
2	12	01	2.0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Absolute	1	paket	12	bulan	1	paket	1	paket	100	1	paket	14	paket	1400
2	12	01	2.0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Absolute	12	Dokumen	12	bulan	12	Dokumen	12	Dokumen	100	12	Dokumen	36	Dokumen	300
2	12	01	2.0 6	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Absolute	12	laporan	12	bulan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	36	laporan	300
2	12	01	2.0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Absolute	12	laporan	12	bulan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	36	laporan	300
2	12	01	2.0 6	00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Absolute	1	dokumen	12	bulan	1	dokumen	1	dokumen	100	2	dokumen	15	dokumen	1500
2	12	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor															
2	12	01	2.0 7	00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Absolute	1	unit	12	bulan	1	unit	1	unit	100	1	unit	14	unit	1400

2	12	01	2.0 7	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Absolute	7	unit	12	bulan	7	unit	7	unit	100	7	unit	26	unit	371,4
2	12	01	2.0 7	00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Absolute	8	unit	12	bulan	8	unit	8	unit	100	8	unit	28	unit	350
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD															
2	12	01	2.0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Absolute	12	Laporan	12	bulan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	300
2	12	01	2.0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Absolute	12	laporan	12	bulan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	36	laporan	300
2	12	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara															
2	12	01	2.0 9	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Absolute	1	unit	12	bulan	1	unit	1	unit	100	1	unit	14	unit	1400

2	12	01	2.0 9	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Absolute	3	unit	12	bulan	3	unit	3	unit	100	3	unit	18	unit	600
2	12	01	2.0 9	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Absolute	8	unit	12	bulan	8	unit	8	unit	100	8	unit	28	unit	350
2	12	01	2.0 9	00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Absolute	2	unit	12	bulan	2	unit	2	unit	100	2	unit	16	unit	800
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)															
2	12	02	2.0 1		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)															
2	12	02	2.0 1	00 03	Penyelasian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Masalah Pendaftaran Penduduk	Absolute	1800	Orang	18 00	Org	18 00	Org	18 00	Org	100	18 00	Org	9000 0	Orang	300
2	12	02	2.0 1	00 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Absolute	12	laporan	12	bulan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	36	Laporan	300

2	12	02	2.0 2		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)															
2	12	02	2.0 2	00 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Absolute	7000 0	dokumen	70 00 0	Dok	70 00 0	dokumen	70 00 0	dokumen	100	70 00 0	dokumen	3500 0	dokumen	300
2	12	02	2.0 3		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk																
2	12	02	2.0 3	00 01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerinta dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Absolute	12	Laporan	12	Lap	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	60	laporan	300
2	12	03			Program Pencatatan Sipil																
2	12	03	2.0 1		Pelayanan Pencatatan Sipil																
2	12	03	2.0 1	00 02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Absolute	20	kec	20	kec	20	kec	20	kec	100	20	kec	60	kec	300
2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																

2	12	04	2.0 3		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan															
2	12	04	2.0 3	00 03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Absolute	20	laporan	20	Lap	20	laporan	20	laporan	100	98	persen	216	persen	300
2	12	04	2.0 3	00 04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Absolute	438	dokumen	43 8	Dok	43 8	dokumen	43 8	dokumen	100	43 8	unit	896	unit	300
2	12	04	2.0 3	00 05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Absolute	20	laporan	20	lap	20	laporan	20	laporan	100	20	kec	60	kec	300

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung analisis kinerja pelayanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 berupa :

1. Persentase Penduduk ber KTP per satuan penduduk
2. Persentase Bayi Berakte Kelahiran
3. Persentase Pasangan Berakte Nikah
4. Pelayanan Pembuatan KK dan KTP-El sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan selama maksimal 2 (dua) hari setelah prosedur dan persyaratan dipenuhi.
5. Pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan sipil sesuai dengan standar pelayanan minimum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung adapun akta kelahiran dibawah 1 tahun penyelesaian selama 2 hari kerja.
6. Pelayanan Legalisir KTP, KK dan Akta-akta Pencatatan Sipil waktu penyelesaian 1 hari kerja
7. Penyelesaian Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan standar pelayanan minimum yaitu selama 2 (dua) hari kerja setelah prosedur dan persyaratan dipenuhi.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing

Tabel TC. 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG
KOTA BANDAR LAMPUNG

N O	INDIKATOR	SPM / Stand ar nasio nal	IKK	Target Renstra SKPD								Realisasi Capaian				Proyeksi			
				Tahun (Thn n-2) 2023		Tahun (Thn n-1) 2024		Tahun (Thn n) 2025		Tahun (Thn n+1) 2026		Tahun (Thn n-2) 2023		Tahun (Thn n+1) 2024		Tahun (Thn n) 2026		Tahun (Thn hn+1) 2027	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				14.480.988.647		15.780.988.647		15.886.304.650		13.377.352.254,29		9.558.959.136		8.620.714.680		13.377.352.254,29		13.996.436.411,11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.104.231.127		12.994.231.127		12.845.421.613		11.278.040.664,57		8.913.561.975		7.982.907.030		11.278.040.664,57		11.871.975.247.80
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				31.000.000		31.000.000,00		31.000.000,00		31.664.446,00		24.425.800,00		19.409.500 ,00		31.664.446,00		33.247.668,30
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Konsolidasi			5 dok	31.000.000,00	5 dok	31.000.000,00	5 dok	31.000.000,00	5 dok	31.664.446,00	5 dok	24.425.800	5 dok	19.409.500	5 dok	31.664.446,00	5 dok	33.247.668,30
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.259.056.227		6.259.056.227		7.036.512.806,31		6.620.655.219,00		5.129.753.865		5.404.741.013		6.620.655.219,00		6.951.687.979,95
	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			53 org	6.151.556.227	53 org	6.151.556.227,00	53 org	6.916.512.806,31	53 org	6.495.769.719,00	53 org	4.997.853.865	53 org	5.288.311.013	53 org	6.495.769.719,00	53 org	6.820.558.204,95
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SK			5 dok	107.500.000,00	5 dok	107.500.000,00	5 dok	120.000.000,00	5 dok	124.885.500,00	5 dok	131.900.000	5 dok	116.430.000	5 dok	124.885.500,00	5 dok	131.129.775,00

Rancangan Akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026.

	Administrasi Umum Perangkat Daerah				614.242.380,00		614.242.380,00		652.488.050,00		647.525.033,00		1.363.442.500		400.146.985		647.525.033,00		689.901.284,05
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor yang Disediakan			1 pak et	14.700.000,00	1 pak et	14.700.000,00	1 pak et	4.000.000,00	1 pak et	14.654.095,00	1 pak et	14.660.000	1 pak et	12.673.750	1 pak et	14.654.095,00	1 pak et	15.386.799,75
	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 pak et	189.929.746,00	1 pak et	189.929.746,00	1 pak et	220.000.000,00	1 pak et	183.757.050,00	1 pak et	943.110.370	1 pak et	121.455.000	1 pak et	183.757.050,00	1 pak et	192.944.902,50
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 pak et	23.000.000,00	1 pak et	23.000.000,00	1 pak et	27.500.000,00	1 pak et	22.623.497,00	1 pak et	20.820.198	1 pak et	16.437.350	1 pak et	22.623.497,00	1 pak et	23.754.671,85
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 pak et	8.000.000,00	1 pak et	8.000.000,00	1 pak et	20.000.000,00	1 pak et	7.200.000,00	1 pak et	4.005.000	1 pak et	1.957.500	1 pak et	7.200.000,00	1 pak et	7.560.000,00
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 pak et	179.801.710,00	1 pak et	179.801.710,00	1 pak et	220.000.000,00	1 pak et	194.638.000,00	1 pak et	197.486.222	1 pak et	131.350.000	1 pak et	194.638.000,00	1 pak et	204.369.900,00
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 buah	6.000.000,00	12 buah	6.000.000,00	12 buah	8.500.000,00	12 buah	6.000.000,00	12 buah	6.000.000	12 buah	6.000.000	12 buah	6.000.000,00	12 buah	6.300.000,00
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 lap	19.500.000,00	12 lap	19.500.000,00	12 lap	20.000.000,00	12 lap	20.900.000,00	12 lap	2.000.000	12 lap	2.401.000	12 lap	20.900.000,00	12 lap	21.945.000,00
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 lap	141.700.000,00	12 lap	141.700.000,00	12 lap	100.000.000,00	12 lap	143.257.000,00	12 lap	147.177.160	12 lap	84.416.635	12 lap	143.257.000,00	12 lap	150.419.850,00
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			2 dokumen	31.610.924,00	2 dokumen	31.610.924,00	2 dokumen	32.488.050,00	2 dokumen	54.495.391,00	2 dokumen	28.183.550	2 dokumen	23.455.750	2 dokumen	54.495.391,00	2 dokumen	67.220.160,55
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				486.000.000,00		486.000.000,00		165.000.000,00		2.245.715.996,57		812.249.000		620.082.091		2.245.715.996,57		2.378.034.314,90
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan			-	0	-	0	-	0	-	200.000.000,00	-	0	-	0	2 unit	200.000.000,00	2 unit	210.000.000,00
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 pak et	77.500.000,00	1 pak et	77.500.000,00	1 pak et	25.000.000,00	1 pak et	168.394.406,57	1 pak et	127.790.000	1 pak et	0	1 pak et	168.394.406,57	1 pak et	186.814.126,90
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			7 unit	337.500.000,00	7 unit	337.500.000,00	7 unit	120.000.000,00	7 unit	1.727.321.560,00	7 unit	510.694.000	7 unit	620.082.091	7 unit	1.727.321.560,00	7 unit	1.823.720.188,00

	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		8 unit	71.000.000,00	8 unit	71.000.000,00	8 unit	20.000.000,00	8 unit	150.000.000,00	8 unit	173.765.000	8 unit	0	8 unit	150.000.000,00	8 unit	157.500.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.904.540.000		1.904.540.000		835.000.000,00		1.497.560.000,00		1.366.604.855		1.396.737.253		1.497.560.000,00		1.572.438.000,00
	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 buah	29.040.000,00	12 buah	29.040.000,00	12 buah	200.000.000,00	12 buah	49.560.000,00	12 buah	22.364.855	12 buah	21.737.253	12 buah	49.560.000,00	12 buah	52.038.000,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	1.875.500.000,00	12 laporan	1.875.500.000,00	12 laporan	635.000.000,00	12 laporan	1.248.000.000,00	12 laporan	1.344.240.000	12 laporan	1.375.000.000	12 laporan	1.248.000.000,00	12 laporan	1.310.400.000,00
	Jumlah Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		-	0	-	0	-	0	-	200.000.000,00	-	0	-	0	12 lap	200.000.000,00	12 lap	210.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			202.635.000		202.635.000,00		350.000.000,00		234.920.000,00		217.085.955		141.790.188		234.920.000,00		246.666.000,00
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	35.185.000,00	1 unit	35.185.000,00	1 unit	50.000.000,00	1 unit	40.670.000,00	1 unit	36.511.250,00	1 unit	43.635.500,00	1 unit	40.670.000,00	1 unit	42.703.500,00
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 unit	60.250.000,00	3 unit	60.250.000,00	3 unit	200.000.000,00	3 unit	43.370.000,00	3 unit	59.387.200	3 unit	47.099.060	3 unit	43.370.000,00	3 unit	45.538.500,00
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8 unit	79.200.000,00	8 unit	79.200.000,00	8 unit	50.000.000,00	8 unit	107.880.000,00	8 unit	93.295.780	8 unit	8.955.000	8 unit	107.880.000,00	8 unit	113.274.000,00
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 unit	28.000.000,00	2 unit	28.000.000,00	2 unit	50.000.000,00	2 unit	43.000.000,00	2 unit	27.891.725	2 unit	42.100.628	2 unit	43.000.000,00	2 unit	45.150.000,00
	Program Pendaftaran Penduduk			2.076.757.520		2.076.757.520		2.125.368.591,41		698.690.541,31		301.567.076		197.546.900		698.690.541,31		707.060.794,34
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			0		0		0		220.000.000,00		0		0		220.000.000,00		225.000.000,00

	Jumlah Penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk				0		0		0	180 org	120.000.000,00		0		0	180 org	120.000.000,00		126.000.000,00
	Jumlah Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk				0		0		0	12 lap	100.000.000,00		0		0	12 lap	100.000.000,00		105.000.000,00
	Penataan Pendaftaran Penduduk				2.076.757.520		2.076.757.520		2.125.368.591,41		371.200.984,31		301.567.076		197.546.900		371.200.984,31		369.196.759,49
	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia			700 00 dok um en	2.076.757.520	700 00 dok um en	2.076.757.520,00	700 00 dok um en	2.125.368.591,41	700 00 dok um en	371.200.984,31	700 00 dok ume n	301.567.076	700 00 dok ume n	197.546.900	700 00 dok um en	371.200.984,31	700 00 dok um en	369.196.759,49
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				230.000.000		230.000.000,00		138.081.510,00		107.489.557,00		40.555.784		61.189.425		107.489.557,00		112.864.034,85
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			12 lap ora n	230.000.000,00	12 lap ora n	230.000.000,00	12 lap ora n	138.081.510,00	12 lap ora n	107.489.557,00	12 lapo ran	40.555.784	12 lapo ran	61.189.425	12 lap ora n	107.489.557,00	12 lap ora n	112.864.034,85
	Program Pencatatan Sipil						230.000.000,00		319.058.235,56		341.670.385,08		106.325.000		188.245.000		341.670.385,08		345.763.567,12
	Pelayanan Pencatatan Sipil						230.000.000,00		319.058.235,56		132.665.367,00						132.665.367,00		126.308.298,14
	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan			20 Kec.	230.000.000,00	20 Kec.	230.000.000,00	20 Kec.	319.058.235,56	20 Kec.	132.665.367,00	20 Kec.	106.325.000	20 Kec.	188.245.000	20 Kec.	132.665.367,00	20 Kec.	126.308.298,14
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										209.005.018,08						209.005.018,08		219.455.268,98
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				0		0		0	12 lap ora n	109.005.018,08		0		0	12 lap ora n	109.005.018,08	12 lap ora n	114.455.268,98

	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil				0		0		0	12 lap	100.000.000,00			0		0	12 lap	100.000.000,00		
10	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				300.000.000		480.000.000		596.456.210		851.436.663,33			237.505.085		252.015.750		851.436.663,33		861.636.801,85
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				300.000.000		480.000.000		596.456.210		851.436.663,33			237.505.085		252.015.750		851.436.663,33		861.636.801,85
	Jumlah laporan hasil fasilitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan			20 lap ora n	150.000.000,00	20 lap ora n	150.000.000,00	20 lap ora n	122.408.772,41	20 lap ora n	279.077.661,00	20 lapo ran	175.643.885	20 lapo ran	171.889.750	20 lap ora n	279.077.661,00	20 lap ora n	283.031.544,05	
	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan			438 dok um en	150.000.000,00	438 dok um en	150.000.000,00	438 dok um en	121.550.625,00	438 dok um en	215.690.492,33	438 dok ume n	61.861.200	438 dok ume n	80.126.000	438 dok um en	215.690.492,33	438 dok um en	216.475.016,95	
	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan			20 lap ora n	180.000.000,00	20 lap ora n	180.000.000,00	20 lap ora n	352.496.812,50	20 lap ora n	356.668.510,00	20 lapo ran	291.826.800	20 lapo ran	360.322.600	20 lap ora n	356.668.510,00	20 lap ora n	362.130.240,85	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan										207.514.000,00						207.514.000,00		217.889.700,00	
	Penyusunan Profil Kependudukan										207.514.000,00						207.514.000,00		217.889.700,00	
	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				0		0		0	1 dok um en	100.000.000,00			0		0	1 dok um en	100.000.000,00	1 dok um en	105.000.000,00
	Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain				0		0		0	1 dok um en	107.514.000,00			0		0	1 dok um en	107.514.000,00	1 dok um en	112.889.700,00

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan) maupun Pemerintah Provinsi Lampung (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas sumber daya manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk (UU Nomor 23 Tahun 2006, PP Nomor 37 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 serta PP Nomor 41 Tahun 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus-menerus melalui :
 - a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegritasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK
 - b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem online
 - c. Penyediaan database penduduk yang lengkap, akurat dan up to date

- d. Penyediaan SDM secara kuantitas (seleksi atas pegawai pindahan, penempatan pegawai sesuai luas wilayah/banyaknya pelayanan) dan kualitas (peningkatan pengetahuan/bimtek,penyegaran/rotasi penempatan dengan kualitas SDM yang merata disetiap bidang/wilayah)
2. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi
3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mudah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat
4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil
5. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung wajib disiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel yang pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual diperlukan ketersediaannya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Review rancangan awal renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2025 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing Bidang dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana tersebut pada tabel Review Rancangan awal RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan pada tabel TC-31 sebagai berikut:

Tabel TC 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2026
Kota Bandar Lampung

no	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Rp.13.337.352.254,21					Rp.13.337.352.254,21	
			Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasioanl OPD		Rp.11.278.040.664,57			Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasioanl OPD		Rp.11.278.040.664,57	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu		Rp.31.664.446,00			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu		Rp.31.664.446,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISDUK CAPIL	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Konsolidasi	5 dokumen	Rp. 31.664.446,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISDUK CAPIL	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Konsolidasi	5 dokumen	Rp. 31.664.446,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		Rp. 6.620.655.219,00			Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		Rp. 6.620.655.219,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISDUK CAPIL	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang	Rp. 6.495.769.719,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISDUK CAPIL	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang	Rp. 6.495.769.719,00	

Rancangan Akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026.

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISDUK CAPIL	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen	Rp. 124.885.500,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	DISDUK CAPIL	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen	Rp. 124.885.500,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		Rp. 647.523.033,00			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		Rp. 647.523.033,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISDUK CAPIL	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp.14.654.095,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISDUK CAPIL	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp.14.654.095,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISDUK CAPIL	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp. 183.757.050,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISDUK CAPIL	Jumlah Paket Peralatan dan Perelngkapan Kantor yang disediakan	1 paket	Rp. 183.757.050,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISDUK CAPIL	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Rp. 22.623.497,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISDUK CAPIL	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Rp. 22.623.497,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISDUK CAPIL	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp. 7.200.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISDUK CAPIL	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp. 7.200.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DISDUK CAPIL	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Rp. 194.638.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DISDUK CAPIL	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Rp. 194.638.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	DISDUK CAPIL	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	Rp. 6.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	DISDUK CAPIL	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	Rp. 6.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISDUK CAPIL	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Rp. 20.900.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISDUK CAPIL	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Rp. 20.900.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	DISDUK CAPIL	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp. 143.257.000,00	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	DISDUK CAPIL	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp. 143.257.000,00	

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	DISDUK CAPIL	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	Rp. 54.495.391,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	DISDUK CAPIL	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	Rp. 54.495.391,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		Rp. 2.245.715.966,57			Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		Rp. 2.245.715.966,57	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISDUK CAPIL	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	Rp. 200.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISDUK CAPIL	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	Rp. 200.000.000,00	
	Pengadaan Mebel	DISDUK CAPIL	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	Rp. 168.394.406,57	Pengadaan Mebel	DISDUK CAPIL	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	Rp. 168.394.406,57	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISDUK CAPIL	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	Rp. 1.727.321.560,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISDUK CAPIL	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	Rp. 1.727.321.560,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISDUK CAPIL	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	Rp. 150.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISDUK CAPIL	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	Rp. 150.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		Rp.1 497.560.000,00			Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		Rp.1 497.560.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISDUK CAPIL	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	Rp. 49.560.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISDUK CAPIL	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	Rp. 49.560.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISDUK CAPIL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp. 1.248.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISDUK CAPIL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp. 1.248.000.000,00	
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	DISDUK CAPIL	Jumlah Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12 laporan	Rp. 200.000.000,00	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	DISDUK CAPIL	Jumlah Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12 laporan	Rp. 200.000.000,00	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		Rp. 234.920.000,00			Inventaris Kantor yang Terpelihara		Rp. 234.920.000,00	
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>1 unit</i>	<i>Rp. 40.670.000,00</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>1 unit</i>	<i>Rp. 40.670.000,00</i>	
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>3 unit</i>	<i>Rp. 43.370.000,00</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>3 unit</i>	<i>Rp. 43.370.000,00</i>	
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>8 unit</i>	<i>Rp. 107.880.000,00</i>	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>8 unit</i>	<i>Rp. 107.880.000,00</i>	
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>2 unit</i>	<i>Rp. 43.000.000,00</i>	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>2 unit</i>	<i>Rp. 43.000.000,00</i>	
	Program Pendaftaran Penduduk		1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD), 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		Rp. 698.690.541,31			1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD), 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		Rp. 698.690.541,31	

	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)		Rp. 220.000.000,00			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)		Rp. 220.000.000,00	
	<i>Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Jumlah Penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk</i>	<i>1800 orang</i>	<i>Rp. 120.000.000,00</i>	<i>Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Jumlah Penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk</i>	<i>1800 orang</i>	<i>Rp. 120.000.000,00</i>	
	<i>Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Jumlah Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk</i>	<i>12 laporan</i>	<i>Rp. 100.000.000,00</i>	<i>Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Jumlah Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk</i>	<i>12 laporan</i>	<i>Rp. 100.000.000,00</i>	
	Penataan Pendaftaran Penduduk		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		Rp. 371.200.984,31			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		Rp. 371.200.984,31	
	<i>Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia</i>	<i>70.000 dokumen</i>	<i>Rp. 371.200.984,31</i>	<i>Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan</i>	<i>70.000 dokumen</i>	<i>Rp. 371.200.984,31</i>	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk		Rp. 107.489.557,00			Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk		Rp. 107.489.557,00	
	<i>Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>12 laporan</i>	<i>Rp. 107.489.557,00</i>	<i>Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>12 laporan</i>	<i>Rp. 107.489.557,00</i>	

	Program Pencatatan Sipil		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-4 tahun		Rp. 341.670.385,00			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-4 tahun		Rp. 341.670.385,00	
	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Akta Kelahiran yang terbit		Rp. 132.665.367,00			Jumlah Akta Kelahiran yang terbit		Rp. 132.665.367,00	
	<i>Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan</i>	<i>20 kec</i>	<i>Rp. 132.665.367,00</i>	<i>Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	<i>20 kec</i>	<i>Rp. 132.665.367,00</i>	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				Rp. 209.005.018,00					Rp. 209.005.018,00	
	<i>Koordinasi dengan Kantor Kementerian yg menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yg menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota</i>	<i>12 laporan</i>	<i>Rp. 109.005.018,00</i>	<i>Koordinasi dengan Kantor Kementerian yg menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota</i>	<i>12 laporan</i>	<i>Rp. 109.005.018,00</i>	
	<i>Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil</i>	<i>12 laporan</i>	<i>Rp. 100.000.000,00</i>	<i>Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil</i>	<i>DISDUK CAPIL</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil</i>	<i>12 laporan</i>	<i>Rp. 100.000.000,00</i>	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan		Rp. 851.436.663,33			Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan		Rp. 851.436.663,33	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Rp. 851.436.663,33					Rp. 851.436.663,33	

	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DISDUK CAPIL	Jumlah laporan hasil fasilitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	20 laporan	Rp. 279.077.661,00	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DISDUK CAPIL	Persentase jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan pameran Bandar Lampung expo dan Lampung Fair	20 laporan	Rp. 279.077.661,00	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	DISDUK CAPIL	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	438 dokumen	Rp. 215.690.492,33	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	DISDUK CAPIL	Jumlah Spanduk, banner dan media informasi kependudukan dan pencatatan sipil	438 dokumen	Rp. 215.690.492,33	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DISDUK CAPIL	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	20 laporan	Rp. 356.668.510,00	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DISDUK CAPIL	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20 laporan	Rp. 356.668.510,00	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan		Rp. 207.514.000,00			Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan		Rp. 207.514.000,00	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD)		Rp. 207.514.000,00			Persentase Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD)		Rp. 207.514.000,00	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp. 100.000.000,00	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp. 100.000.000,00	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1 dokumen	Rp. 107.514.000,00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1 dokumen	Rp. 107.514.000,00	

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan

Terkait dengan usulan program dan kegiatan masyarakat secara keseluruhan berasal dari usulan dari bawah (*bottom-up planning*) yang kemudian dihimpun untuk dibahas dan disesuaikan dengan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang sumber dananya berasal dari APBD maupun dana DAK Pusat. Disamping itu usulan program/kegiatan tersebut juga melalui tahapan dan mekanisme mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan yang kemudian dilanjutkan Musrenbang Tingkat Kabupaten/Kota tetapi sebelumnya dibahas di Forum OPD.

Usulan Program/Kegiatan Usulan Pemangku kepentingan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang sumber dananya berasal dari APBD maupun dana DAK Pusat dapat dilihat dari penyajian tabel 2.5 berikut :

Tabel TC 32
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Bandar Lampung

no	Rancangan Akhir RKPD				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	DISDUKCAPIL	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5 dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	DISDUKCAPIL	<i>Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	53 orang	
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	DISDUKCAPIL	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD</i>	5 dokumen	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	DISDUKCAPIL	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor yang Disediakan</i>	1 paket	
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	DISDUKCAPIL	<i>Jumlah Alat Tulis Kantor yang Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 paket	
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	DISDUKCAPIL	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 paket	
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	DISDUKCAPIL	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 paket	
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	DISDUKCAPIL	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 paket	
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan</i>	DISDUKCAPIL	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 bulan	
	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	DISDUKCAPIL	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 laporan	
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	DISDUKCAPIL	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 laporan	
	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD</i>	DISDUKCAPIL	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	2 dokumen	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>2 unit</i>	
	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Terlaksananya Pengadaan Meubel</i>	<i>1 paket</i>	
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi dan Terlaksannya Pengadaan Komputer</i>	<i>7 unit</i>	
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Terlaksananya Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor</i>	<i>8 unit</i>	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Terlaksananya pembayaran biaya telpon, air, listrik dan internet</i>	<i>12 bulan</i>	
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Terlaksananya Jasa Administrasi Kantor</i>	<i>12 laporan</i>	
	<i>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Jumlah Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</i>	<i>12 laporan</i>	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan</i>	<i>1 unit</i>	
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Mobil Jabatan</i>	<i>3 unit</i>	
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	<i>8 unit</i>	
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	<i>2 unit</i>	
	Program Pendaftaran Penduduk				
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
	<i>Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Jumlah Penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk</i>	<i>1800 orang</i>	
	<i>Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Jumlah Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk</i>	<i>12 laporan</i>	
	Penataan Pendaftaran Penduduk				
	<i>Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia</i>	<i>70000 dokumen</i>	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				

	<i>Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>12 laporan</i>	
	Program Pencatatan Sipil				
	Pelayanan Pencatatan Sipil				
	<i>Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan</i>	<i>20 kec</i>	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				
	<i>Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota</i>	<i>12 laporan</i>	
	<i>Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil</i>	<i>12 laporan</i>	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
	<i>Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Jumlah laporan hasil fasilitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan</i>	<i>20 laporan</i>	
	<i>Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan</i>	<i>438 dokumen</i>	
	<i>Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan</i>	<i>20 laporan</i>	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan				
	Penyusunan Profil Kependudukan				
	<i>Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota</i>	<i>1 dokumen</i>	
	<i>Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain</i>	<i>1 dokumen</i>	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran penduduk setelah China, India dan USA, sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan merupakan keharusan yang pelaksanaannya tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga telah ditetapkan Visi Nasional dibidang kependudukan adalah “Tertib administrasi kependudukan pada tahun 2015” .

Hal ini didasari dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Pemerintah dengan dukungan DPR telah memprogramkan 3 (tiga) program strategis nasional, yaitu :

- a. Pemutakhiran data kependudukan
- b. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- c. Penerapan KTP elektronik

Tujuan utama program strategis Nasional tersebut diatas adalah mereformasi administrasi kependudukan, yang meliputi :

- a. Tertib database kependudukan yang valid, akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai data statistik yang akurat.
- b. Tertib NIK, bahwa setiap penduduk wajib mempunyai satu NIK, yang merupakan nomor identitas diri penduduk bersifat unik dan

tunggal, berlaku seumur hidup serta sangat diperlukan untuk instrument multifungsi dalam pelayanan public.

- c. Tertib dokumen kependudukan, diarahkan bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terjadi kepastian status hukum penduduk.

Program strategis nasional merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang implementasinya harus disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan dan dijadikan program prioritas daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pernyataan Visi dan Misi menjadi dasar bagi perumusan kerangka kebijakan dan strategi pembangunan oleh seluruh pelaku pembangunan khususnya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2025-2029 berdasarkan kondisi ideal yang diinginkan dan yang dapat dicapai yaitu :

“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”.

Dengan rumusan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
5. Mengembangkan masyarakat agamais, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat religius
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana
- 2) Meningkatkan semangat kerja dan pengembangan teknologi pengolahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3) Meningkatkan penertiban aparat penyelenggaraan pelayanan untuk pengelolaan data Adminstrasi kependudukan yang Profesional.
- 4) Meningkatkan mutu pelayanan administasi kependudukan terhadap warga sesuai standar oprasional pelayanan yang ditetapkan.

- 5) Meningkatkan keakuratan database kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bandar Lampung.
- 6) Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil terutama kepemilikan KTP-el bagi warga yang telah memenuhi syarat di Kota Bandar Lampung.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Misi 1

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),

Sarana dan Prasarana

Tujuan :

Menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang handal dan cakap sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang administrasi kependudukan

Sasaran :

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Misi 2

Meningkatkan semangat kerja dan pengembangan teknologi pengolahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuan :

Melengkapi sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan peralatan yang memadai dan berkualitas sesuai dengan perkembangan teknologi yang dibutuhkan sistem administrasi kependudukan yang digunakan

Sasaran :

Peralatan kantor dan komputerisasi pengolahan database kependudukan

Misi 3

Meningkatkan penertiban aparat penyelenggaraan pelayanan untuk pengelolaan data Administrasi kependudukan yang Profesional.

Tujuan :

Menertibkan administrasi kependudukan Kota Bandar Lampung dan mengolah data kependudukan secara professional

Sasaran :

Administrasi Kependudukan Kota Bandar Lampung dan Sistem Administrasi Kependudukan

Misi 4

Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan terhadap warga sesuai standar oprasional pelayanan yang ditetapkan.

Tujuan :

Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan dokumen - dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil serta administrasi kependudukan lainnya

Sasaran :

Pelayanan prima kepada masyarakat Kota Bandar Lampung

Misi 5

Meningkatkan keakuratan database kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bandar Lampung.

Tujuan :

Meningkatkan mutu pengolahan data kependudukan Kota BandarLampung untuk mendapatkan database kependudukan yang tepat dan Akurat

Sasaran :

Data Kependudukan Kota Bandar Lampung

Misi 6

Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil terutama kepemilikan KTP-el bagi warga yang telah memenuhi syarat di Kota Bandar Lampung.

Tujuan :

Penerapan KTP-el di Kota Bandar Lampung berjalan dengan baik dan lancar.

Sasaran :

Warga masyarakat di 20 Kecamatan se - Kota Bandar Lampung

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung :

4.1.1 PROGRAM

Terdapat 4 Program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota
- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

4.1.2 KEGIATAN

Dari 4 Program diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung didukung dengan 10 Kegiatan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.3.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.3.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.3.7 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 1.3.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.3.9 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.4.1 Pengadaan Meubel
- 1.4.2 Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
- 1.4.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.4.4 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.5.3 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6.4 Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

2.1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 2.1.1 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
- 2.1.2 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2.2 Penataan Pendaftaran Penduduk

- 2.2.1 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan

2.3 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

- 2.3.1 Koodinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

3.1 Pelayanan Pencatatan Sipil

- 3.1.1 Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

3.2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- 3.2.1 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam memelihara Hubungan Timbal Balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

3.2.2 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil

4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

4.1 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 4.1.1 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 4.1.2 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
- 4.1.3 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk

5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

5.1 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 5.1.1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
- 5.1.2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

TABEL TC.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Renja Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			100%	Rp 13.337.352.254,21			100%	Rp 13.996.436.411,11
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		95%	Rp 11.278.040.664,57			95%	Rp 11.871.975.247,80
2.12.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		60%	Rp 31.664.446,00			60%	Rp 33.247.668,30
2.12.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bandar Lampung	5 Dokumen	Rp 31.664.446,00	APBD		5 Dokumen	Rp 33.247.668,30
2.12.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		100%	Rp 6.620.655.219,00			100%	Rp 6.951.687.979,95

Rancangan Akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026.

2.12.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Lampung	53 orang	Rp 6.495.769.719,00	APBD		53 orang	Rp 6.820.558.204,95
2.12.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bandar Lampung	5 Dokumen	Rp 124.885.500,00	APBD		5 Dokumen	Rp 131.129.775,00
2.12.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		98%	Rp 647.525.033,00			98%	Rp 689.901.284,65
2.12.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	1 paket	Rp 14.654.095,00	APBD		1 paket	Rp 15.386.799,75
2.12.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	1 paket	Rp 183.757.050,00	APBD		1 paket	Rp 192.944.902,50
2.12.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Bandar Lampung	1 paket	Rp 22.623.497,00	APBD		1 paket	Rp 23.754.671,85
2.12.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	1 paket	Rp 7.200.000,00	APBD		1 paket	Rp 7.560.000,00
2.12.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bandar Lampung	1 paket	Rp 194.638.000,00	APBD		1 paket	Rp 204.369.900,00
2.12.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bandar Lampung	12 buah	Rp 6.000.000,00	APBD		12 buah	Rp 6.300.000,00
2.12.01.2.06.0008.	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bandar Lampung	12 laporan	Rp 20.900.000,00	APBD		12 laporan	Rp 21.945.000,00
2.12.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Lampung	12 laporan	Rp 143.257.000,00	APBD		12 laporan	Rp 150.419.850,00
2.12.01.2.06.0011.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bandar Lampung	2 dokumen	Rp 54.495.391,00	APBD		2 dokumen	Rp 67.220.160,55

2.12.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		98%	Rp 2.254.715.966,57			98%	Rp 2.378.034.314,90
2.12.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Bandar Lampung	2 unit	Rp 200.000.000,00	APBD		1 paket	Rp 210.000.000,00
2.12.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bandar Lampung	1 paket	Rp 168.394.406,57	APBD		1 paket	Rp 186.814.126,90
2.12.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bandar Lampung	7 unit	Rp 1.727.321.560,00	APBD		7 unit	Rp 1.823.720.188,00
2.12.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bandar Lampung	8 unit	Rp 150.000.000,00	APBD		8 unit	Rp 157.500.000,00
2.12.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		12 bulan	Rp 1.497.560.000,00			12 bulan	Rp 1.527.438.000,00
2.12.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Bandar Lampung	12 buah	Rp 49.560.000,00	APBD		12 buah	Rp 52.038.000,00
2.12.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	12 laporan	Rp 1.248.000.000,00	APBD		12 laporan	Rp 1.310.400.000,00
2.12.01.2.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Penumpang	Jumlah Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Bandar Lampung	12 laporan	Rp 200.000.000,00	APBD		12 laporan	Rp 210.000.000,00
2.12.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara		98%	Rp 234.920.000,00			98%	Rp 246.666.000,00
2.12.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Bandar Lampung	1 unit	Rp 40.670.000,00	APBD		1 unit	Rp 42.703.500,00

2.12.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan Perizinannya	Bandar Lampung	3 unit	Rp 43.370.000,00	APBD		3 unit	Rp 45.538.500,00
2.12.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	Bandar Lampung	8 unit	Rp 107.880.000,00	APBD		8 unit	Rp 113.274.000,00
2.12.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bandar Lampung	2 unit	Rp 43.000.000,00	APBD		2 unit	Rp 45.150.000,00
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		98%	Rp 698.690.541,31			98%	Rp 707.060.794,34
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)			Rp. 220.000.000,00				Rp. 225.000.000,00
2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Bandar Lampung	1800 orang	Rp. 120.000.000,00			1800 orang	Rp. 120.000.000,00
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Bandar Lampung	12 laporan	Rp. 100.000.000,00			12 laporan	Rp. 105.000.000,00
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)		98%	Rp 371.200.984,31			98%	Rp 369.196.759,49
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Bandar Lampung	70000 dokumen	Rp 371.200.984,31	APBD		70000 dokumen	Rp 369.196.759,49

2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Penyampaian informasi melalui media		20 kec	Rp 107.489.557,00			20 kec	Rp 112.864.034,85
2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bandar Lampung	12 laporan	Rp 107.489.557,00	APBD		12 laporan	Rp 112.864.034,85
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 tahun		100%	Rp 341.670.385,00			100%	Rp 345.763.567,12
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kelahiran yang terbit		100%	Rp 132.665.367,00			100%	Rp 126.308.298,14
2.12.03.2.01.0003	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Bandar Lampung	20 kec	Rp 132.665.367,00	APBD		20 kec	Rp 126.308.298,14
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Persentase Penerbitan Akta Kelahiran		100%	Rp 209.005.018,00			100%	Rp 219.455.268,98
2.12.03.2.02.0003	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	12 laporan	Rp 109.005.018,00	APBD		12 laporan	Rp 114.455.268,98
2.12.03.2.02.0004	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Bandar Lampung	12 laporan	Rp 100.000.000,00	APBD		20 kec	Rp 105.000.000,00
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan		96%	Rp 851.536.663,33			96%	Rp 861.636.801,85
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD)		20 kec	Rp 851.536.663,33			20 kec	Rp 861.636.801,85

2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi	Jumlah laporan hasil fasilitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Bandar Lampung	20 laporan	Rp 279.077.661,00	APBD		20 laporan	Rp 283.031.544,05
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Bandar Lampung	438 dokumen	Rp 215.690.492,33	APBD		438 dokumen	Rp 216.475.016,95
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Bandar Lampung	20 laporan	Rp 356.668.510,00	APBD		20 laporan	Rp 362.130.240,85
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan								Rp 210.000.000,00
2.12.05.01	Penyusunan Profil Kependudukan								Rp 210.000.000,00
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	1 dokumen	Rp 100.000.000,00	APBD		1 dokumen	Rp 105.000.000,00
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Bandar Lampung	1 dokumen	Rp 107.514.000,00	APBD		1 dokumen	Rp 105.000.000,00
Jumlah					Rp 13.337.352.254,21				Rp 13.996.436.411,11

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau Community Base Development (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA